

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### a. Komunikasi Politik

Harold Laswell saat ini dikenal sebagai bapak pendiri ilmu komunikasi politik, yang pada saat itu memberitahukan hasil penelitian terkait dengan propaganda politik pada *The American Political Science Review*. Hasil penelitian ini menjelaskan dampak dan pengaruh komunikasi yang dilakukan dengan media radio terhadap keadaan psikologis kelompok maupun individu. Dari hasil penelitian tersebut maka Laswell menjadikan dasar dalam merumuskan ilmu komunikasi massa pada konsepsi yang terkenal “*Why Say What In Wich Channel To Whom With What Effect*”. John Fiske mengatakan bahwa komunikasi dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu ; *pertama*, komunikasi memfokuskan pada proses mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku orang lain. *Kedua*, komunikasi fokus terhadap pesan yang disampaikan dapat menghasilkan sesuatu. Tujuan diadakannya komunikasi ini adalah untuk menyampaikan informasi, menghibur dan juga mempengaruhi.<sup>1</sup> Sedangkan politik merupakan proses pembuatan kebijakan pada sebuah Negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu politik juga dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan kewenangan dan juga kekuasaan dalam sebuah Negara.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam maka dalam proses menyampaikan komunikasi tentunya memiliki etika, yaitu dijelaskan pada Al- Qur’an Surat Al-Isra’{17} : 28 berikut ini

وَأِمَّا عَرَضَ عَلَيْهِمْ آتِبَعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

Artinya: “ Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dri Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”. (QS. Al-Isra’ {17} : 28).

---

<sup>1</sup>John Fiske, “Buku Pengantar Ilmu Hukum” (2012, Depok, n.d.).

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa model komunikasi Islam mengandung unsur –unsur komunikasi secara mendasar, yaitu komunikator, pesan dan komunikan. Yang terjadi tentu tidak hanya searah namun secara imbal balik atau terjadi dua arah. Adapun efektifitas, dapat diprediksi dengan teori kemungkinan, artinya sikap seseorang cenderung tergantung pada umpan yang akan muncul. Jika umpannya baik, lembut atau didoakan dan dijanjikan untuk diberi pada waktu lain, maka hati mereka akan cenderung menerima dan kembali dengan tersenyum, walaupun dengan tangan hampa.<sup>2</sup>

lain halnya dengan komunikasi politik yang diartikan sebagai proses yang saling berkaitan dengan menghubungkan penyampaian informasi antara individu dan juga kelompok di lingkungan masyarakat. Selain itu komunikasi politik juga dapat dikatakan sebagai proses peralihan antar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada satu sistem politik lainnya.<sup>3</sup> Terkait dengan komunikasi politik maka dapat menghubungkan keadaan politik yang berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan sektor kehidupan politik yang berada pada pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan pola pikir dan juga ide-ide dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pada hakikatnya seluruh ide maupun gagasan seharusnya ada 2 pihak yaitu pihak penyampaian dan juga pihak penerima, ini dapat dikatakan sebagai proses komunikasi.

Dilihat dari hakikat komunikasi politik ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang memiliki tujuan pemikiran politik dengan harapan mendapatkan kekuasaan dan kewenangan. Orientasi komunikasi politik dibagi menjadi 2 yaitu ; Pertama, komunikasi politik selalu memfokuskan nilai ataupun upaya-upaya untuk pencapaian tujuan. Kedua, komunikasi politik berorientasi menjamin masa depan selain itu juga senantiasa

---

<sup>2</sup> Mahbub Junaidi, “Komunikasi Qur’ani (Melacak Teori Komunikasi Efektif Perspektif Al- Qur’an)”. 2014. 35.

<sup>3</sup>Risky Abdul Malik, “Komunikasi Politik ( Studi Kegiatan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019,” 2019, 17.

memperhatikan peristiwa masa lalu. Komunikasi politik berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang berasal dari pemikiran masyarakat terhadap generasi penerus.<sup>4</sup> Dari beberapa pemaparan terkait dengan komunikasi politik diatas maka komunikasi politik terbentuk atas beberapa model, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Model Komunikasi Politik.<sup>5</sup>

Ada beberapa model terkait dengan teori komunikasi politik :

a) Komunikasi sebagai Proses Transaksional

Setiap aktivitas tentunya ada proses transaksi, pada kegiatan komunikasi juga melibatkan transaksi antar pihak satu dengan lainnya yaitu transaksi antara komunikator terhadap komunikan.

b) Komunikasi sebagai Proses.

Komunikasi bersifat tidak statis. Semua persoalan komunikasi selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan.

c) Komponen Komunikasi Saling Berkaitan.

Antara komponen satu dengan lainnya tentunya saling berkaitan secara integral dan tidak pernah independen sebab tidak ada pesan tanpa sumber, dan juga tidak ada umpan balik tanpa penerima.

d) Komunikator Bertindak sebagai Satu Kesatuan

Artinya dalam proses berkomunikasi pasti akan bereaksi dengan tubuh dan juga pikiran. Efek dari adanya aksi dan reaksi ketika berkomunikasi ditentukan dengan pemahaman terkait dengan pesan yang disampaikan.

2. Tujuan Komunikasi Politik<sup>6</sup>

Adanya komunikasi politik tentunya berkaitan erat dengan pesan politik yang disampaikan komunikator. Tujuan komunikasi politik diantaranya adalah :

---

<sup>4</sup> Lilik Sumarni, “Komunikasi Politik Para Elit Di Era Virtual Culture,” *Jurnal Perspektif Komunikasi* 1, no. 1 (2017): 1–10.

<sup>5</sup> Acis, “Bab 1 Konsep Komunikasi Islam,” no. Simbiosis Rekama Media (2020): 26.

<sup>6</sup> Rush, Michael dan Philip Althoff, ‘Pengantar Sosiologi Politik’, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), 24.

1) Citra Politik

Salah satu tujuan diadakannya komunikasi politik yaitu membentuk citra partai. Hal ini disebabkan ketika proses komunikasi politik telah dilaksanakan maka akan muncul feedback yaitu dapat berupa pendapat maupun perilaku tertentu. Citra ini berupa gambaran umum pada politik melalui kepercayaan, penilaian maupun pengharapan. Citra politik akan muncul melalui pola pikir yang secara otomatis akan memberikan penilaian.

2) Opini Publik

Komunikasi politik bertujuan untuk membentuk opini publik dan juga mendorong adanya partisipasi politik. Yaitu adanya kebebasan berpendapat, menyatakan kehendak, dan gagasan. Opini publik dapat dikatakan sebagai pendapat umum yang muncul melalui adanya harapan-harapan dari individu maupun kelompok, diskusi atau hasil interaksi.

3) Partisipasi Politik

Menurut Samuel P. Huntington untuk menggalang partisipasi politik baik individu maupun kelompok dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini bisa dilakukan melalui proses penggabungan kepentingan yang aspirasikan kepada pemegang kekuasaan untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Selain itu melalui proses aspirasi individu pada sebuah kelompok yang berupa ide atau gagasan untuk dijadikan sebagai program kerja.

4) Sosialisasi Politik

Menurut David Easton dan Jack Dennis sosialisasi politik merupakan proses perkembangan individu maupun kelompok untuk memperoleh simpati dari pihak sasaran tersebut. Sosialisasi politik berhasil dilakukan ketika muncul pola pikir dan perilaku yang hubungan dengan pesan yang disampaikan.

5) Pendidikan Politik

Tujuan diadakannya komunikasi politik tidak lain adalah untuk memberikan pendidikan politik dengan menanamkan dan mempertahankan sistem

nilai politik pada setiap perilaku dan berfikir baik individu maupun kelompok.

6) Rekrutmen politik

Rekrutmen politik ini dilakukan melalui komunikasi politik dengan berusaha untuk mengajak masuk ke dalam tujuan dan nilai politik, yang secara kongkrit akan dimasukkan pada anggota politik baik sebagai kader, simpatisan maupun anggota organisasi politik.

3. Unsur-Unsur Komunikasi Politik<sup>7</sup>

Untuk memperoleh komunikasi politik yang maksimal tentu harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

a) Komunikator politik

Komunikator politik adalah seorang individu yang memiliki kekuasaan, individu yang menduduki suatu institusi, asosiasi, dan partai politik. Komunikator politik adalah bagian terpenting dalam proses berlangsungnya komunikasi. Komunikator politik ini memiliki kekuasaan dalam mengelola dan juga mengendalikan pesan komunikasi. Sebagai seorang komunikator tentunya harus memiliki daya tarik yang tinggi mulai dari fisik, gaya bicara, kedekatannya dengan komunikan dan tingkahlakunya.

b) Komunikan

Komunikan ini dapat berupa individu maupun kelompok yang berada dalam institusi, organisasi, masyarakat maupun dalam sebuah partai politik. Meskipun khalayak umum posisinya sebagai komunikan. Namun hal itu sifatnya masih sementara. Karena untuk giliran selanjutnya komunikan akan memprakarsai penyampaian pesan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikan akan merubah posisinya sebagai komunikator.

c) Pesan

Pesan merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam melaksanakan komunikasi politik. Pesan

---

<sup>7</sup> Kamaruddin, "Modul Komunikasi Politik," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 6.

yang disampaikan kepada komunikator berupa pesan verbal maupun non verbal. Pesan politik bisa disampaikan oleh politisi, pejabat atau warga Negara yang aktif. Pesan politik yang disampaikan tentunya dapat mempengaruhi peserta komunikasi agar menghasilkan sesuatu.

d) Media komunikasi

Media komunikasi dijadikan sebagai saluran atau perantara untuk mempermudah penyampaian pesan. Media komunikasi dibagi menjadi 3 pertama, media massa, media komunikasi ini dibagi menjadi 2 yaitu komunikasi tatap muka yang bisa langsung menyampaikan secara lisan layaknya seorang komunikator berbicara didepan khalayak umum, selain itu media massa juga bisa melalui perantara antara komunikator dengan komunikan yaitu melalui media massa teknologi, seperti media cetak atau yang lainnya. Kedua, media komunikasi inter personal yaitu media komunikasi yang disampaikan individu kepada individu baik secara bertatap muka maupun melalui perantara. Ketiga, komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian satu pesan kepada khalayak umum. Hal ini dapat berupa penyebaran pamflet, pembagian kaos maupun sembako.

b. Partai Politik

1. Makna Partai Politik

Berdasarkan histori dan juga perkembangan partai politik ini dilahirkan di negara Eropa Barat. Adanya ide-ide yang semakin meluas oleh masyarakat maka menjadi salah satu faktor untuk diperhitungkan dan dilibatkan dalam kegiatan politik. Partai politik ini lahir secara spontan dan berkembang menjadi relasi antara masyarakat dan juga pemerintah.<sup>8</sup> Awal mulanya partai politik dipusatkan pada kelompok politik diparlemen yang sifatnya elitis dan aristokrasi. Namun seiring berjalannya waktu proses partai politik juga menyebar luas di luar parlemen yaitu dengan dibuktikan adanya partai-partai

---

<sup>8</sup> Dasar- Dasar Ilmu Politik, Cetakan Pe (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).



yang berasal dari masyarakat umum yang digunakan sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang sifatnya spontan.

Adanya partai politik merupakan salah satu perwujudan dari adanya pelaksanaan hak asasi manusia yaitu dengan berkumpul, berserikat dan juga menyampaikan pendapat dengan tujuan untuk mendukung proses terlaksananya demokrasi pada suatu Negara. Melalui institusi partai politik modern yang terstruktur, pemilihan umum, adanya kelompok-kelompok penekan maka demokrasi akan berjalan dengan baik.<sup>9</sup>

Partai politik terdiri dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Partai berasal dari Bahasa Latin yaitu “Partire” yang artinya membagi. Adanya partai pada kehidupan politik dulu dinilai negatif. George Washington menganggap partai sebagai penyebar permusuhan dan juga ketidakpuasan terhadap masyarakat umum.<sup>10</sup> Namun seiring perkembangan zaman penilaian tersebut sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik, sebab pada waktu itu pendidikan masyarakat semakin meningkat. Sedangkan politik dalam kamus bahasa Belanda yaitu “Beleid” yang maknanya adalah kebijakan.<sup>11</sup> Plato mendefinisikan politik sebagai sistem kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan dan dipegang oleh kaum Aristokrat yang dipilih melalui proses pembuatan keputusan bersama dan didalamnya tidak terdapat kediktatoran. Sedangkan Ramlan Surbakti mengatakan bahwa politik merupakan upaya yang harus dilewati oleh masyarakat untuk membahas dan mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>12</sup>

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan

---

<sup>9</sup> Ricardo Blaug and John Schwarzmantel sebagaimana dikutip oleh M. Ali Safa’at, ‘Pembubaran Partai Politik’, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 7.

<sup>10</sup> Efriza, *Political Explore*, Bandung : Alfabeta, 2012. 213.

<sup>11</sup> Sri Soemantri Sebagaimana Dikutip Oleh M. Iwan Satriawan, ‘Politik Hukum Pemerintah Desa’, (Yogyakarta : Jurnal PSHK-UII, 2012), 128.

<sup>12</sup> Plato dalam Imam Hidayat, ‘Teori-Teori Politik’, (Malang : Setara Press, 2012), 7.

kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partai, selain itu memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang sifatnya idiil dan materiil. Lain halnya dengan Miriam Budiarmo mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok yang terorganisasi dan memiliki tujuan. Tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kedudukan politik. Sedangkan Sigit Pamungkas menyatakan bahwa partai politik sebagai organisasi untuk memperjuangkan ideologi untuk mendapatkan kekuasaan yang didapatkan dari keikutsertaan dalam proses pemilihan umum.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa definisi partai politik yang telah dikemukakan oleh para ahli maka ciri-ciri partai politik yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan secara rutin
2. Berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan
3. Keikutsertaan dalam kegiatan pemilihan umum
4. Sifatnya lokal dan nasional yang berasal dari masyarakat

Jika suatu organisasi masyarakat tidak memiliki aktivitas yang saling berhubungan, tidak memiliki orientasi dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, tidak mempunyai cabang di daerah dan juga tidak ikut bergabung dalam proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin maka tidak dapat dikatakan sebagai partai politik.

## 2. Kedudukan Partai Politik

Partai politik dikatakan sebagai pokok yang memiliki kedudukan dan peranan yang terpusat dan urgen dalam sistem kedahulatan rakyat. selain itu partai politik juga dijadikan sebagai pilar demokrasi, sebab partai politik menjadi peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang 1945 pasal 6 A ayat 2 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau

---

<sup>13</sup> Sigit Pamungkas, ' Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia', (Yogyakarta : Institute Democracy And Welfarisme, 2011), 5.



sebagai gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sedangkan undang-undang 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik. Berdasarkan undang-undang yang telah dijelaskan maka peran utama partai politik di Indonesia tidak dapat di kesampingkan sebab partai politik merupakan tempat suksesi kepemimpinan selain itu sebagai media masyarakat atas segala peraturan pemerintah melalui lembaga legislatif yang didalamnya terdapat kader partai politik melalui proses kegiatan pemilihan umum yang dilakukan secara rutin.<sup>14</sup>

Partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu ; 1). Sebagai sarana komunikasi politik yaitu antara pemerintah dengan masyarakat. fungsi komunikasi politik ini dijadikan sebagai pihak perumusan kepentingan dan sebagai penyaluran kepentingan masyarakat.<sup>15</sup> Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 11 c UU No 2 Tahun 2011 yaitu partai politik sebagai penyerap dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam membuat dan menetapkan kebijakan pemerintah. 2). Sebagai sarana sosialisasi politik yaitu penyaluran kebijakan pemerintah kepada masyarakat umum. Proses sosialisasi politik ini sebagai proses pembentukan sikap seseorang terhadap peristiwa politik yang sedang terjadi. Proses sosialisasi politik umumnya berjalan dalam jangka waktu panjang mulai anak-anak sampai dewasa.<sup>16</sup> 3). Sebagai sarana rekrutmen politik. Yaitu dibuktikan dengan suksesi kekuasaan, rekrutmen politik menjamin keberlanjutan dan kelestarian partai politik sebagai salah satu upaya menyeleksi calon pemimpin yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. 4). Sebagai sarana pengatur konflik yaitu partai politik berperan dalam meminimalisir

---

<sup>14</sup> Antonio Gramsci dalam Endra Wijaya Dan Zaitun Abdullah, 'Partai Politik dan Problem Keadilan Bagi Madzhab Minoritas di Indonesia' (dalam Jurnal Legislasi Indonesia, 2014),3.

<sup>15</sup> Samuel Huntington dalam Valina Singka Subekti, 'Menyusun Konstitusi Transisi', (Jakarta: Rajawali Press), 2011), 57.

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo dalam Yulia Neta, 'Politik dalam Pemilihan Umum yang Demokratis', (2011), 73.

konflik. Selain itu partai juga bisa dikatakan sebagai pengatur konflik dalam melakukan proses kepentingan masyarakat. 5). Sebagai sarana pembuatan kebijakan. Setelah berupaya untuk mendapatkan kekuasaan maka dalam lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai dengan ideologi partai politik tersebut.

Tujuan adanya partai politik tidak lain adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui proses pemilihan umum. Ideologi, visi dan misi partai ini dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Masyarakat menjadi subyek utama dalam proses perebutan kekuasaan. Salah satu fenomena yang menjadikan program partai politik berjalan adalah tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Fenomena ini masih sering terjadi di Negara berkembang dimana tingkat sumber daya manusia dalam berpendidikan masih rendah.<sup>17</sup>

Lain halnya dengan partai politik Islam. Berdirinya partai politik Islam dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya pertama, banyaknya jumlah umat muslim di Indonesia, yang seharusnya memiliki wadah atau tempat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai Islam. Kedua, munculnya kesadaran umat muslim untuk berdakwah melalui media politik, namun disisi lain tidak mengesampingkan jalur kultural. Apabila umat muslim memegang kekuasaan maka proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui undang-undang negara akan dipermudah. Ketiga, perubahan pola pikir umat Islam terkait dengan politik, yang awal mulanya menganggap bahwa politik adalah urusan duniawi menjadi ukhrawi. Karena memutuskan untuk memilih melalui pemilu adalah ibadah. Keempat, partai politik Islam tentunya bersifat terbuka dan *Rahmatan lil'alamin*. Kelima, ideologi yang digunakan tentunya berbasis Islam. Keenam, pemimpin dalam partai politik Islam harus memenuhi 4 kategori yaitu *sidiq, amanah, fathonah* dan

---

<sup>17</sup> Contoh Kasus dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999-2014 Hampir Semua Partai Mengandalkan Ketua Partai.

tablig. Namun disisi lain harus memenuhi kriteria internal pada partai politik Islam itu sendiri.<sup>18</sup>

Partai politik Islam merupakan partai yang sangat berkembang dan sesuai dengan ideologi Islam. Banyaknya partai politik Islam tentunya dituntut agar mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan Indonesia. Sama halnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKB merupakan partai yang berideologi Islam Moderat, selain itu PKB merupakan partai politik Islam yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKB merupakan partai politik Islam yang memiliki prinsip pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*.

### 3. Varian Keberagaman Umat Muslim

Kebudayaan Jawa merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dengan pengaruh Hindu-Budha, Cina, Arab atau Islam dan Barat. Kajian terkait dengan Jawa yang di relasikan dengan Islam adalah salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Bahkan ilmuan Barat tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut. Salah satu ilmuan Barat yang tertarik yaitu Clifford Geertz dan Mark R Woodward. Kedua ilmuan ini tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan budaya Jawa yang dimasuki nuansa Islam.

#### 1) Clifford Gertz

Clifford Gertz lahir di Sun Fransisco , California pada tahun 1926 dan meninggal dunia pada 31 oktober 2006 di usia 80 tahun. Terkait dengan varian keberagaman Clifford Gertz melakukan penelitian pada tahun 1950-an di Pare, Mojokuto.

---

<sup>18</sup> Rita Eka Izzaty, Budi Astuti, and Nur Cholimah, "Peran Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013, 24–26.

Dari hasil penelitian tersebut Clifford Geertz mengkategorikan aliran masyarakat Jawa diantaranya abangan, santri dan priyayi. Setelah itu Clifford Geertz berusaha untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan beberapa kategori tersebut. Clifford Geertz menggunakan pendekatan agama sebagai sistem kebudayaan. Kebudayaan ini sendiri dijadikan sebagai berbagai macam peraturan-peraturan yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Kategori abangan memfokuskan pada pentingnya animistik, santri yang lebih mengunggulkan aspek keislaman, sedangkan priyayi mengunggulkan aspek hindu. Dari beberapa citra yang telah dijelaskan abangan berkaitan dengan roh halus yang menimbulkan kesengsaraan manusia, santri berhubungan dengan tindakan-tindakan yang berhaluan islam, priyayi berkaitan dengan tingkah laku, tarian, kesenian, bahasa dan busana.

Varian abangan merupakan jenis varian yang percaya terhadap roh dan makhluk ghaib, maka dari itu varian abangan ini melakukan suatu perkumpulan dengan mendatangkan roh tersebut untuk memenuhi keinginan mereka yang biasa disebut dengan slametan. Adanya kepercayaan terhadap roh dan berbagai macam slametan maka varian abangan ini juga mempercayai adanya dukun. Slametan ini ada pada setiap proses kehidupan pada golongan abangan. Slametan ini sangat berpengaruh pada perilaku dan munculnya keseimbangan emosional individu yang telah dislameti.<sup>19</sup>

Varian santri merupakan varian yang teguh dalam melaksanakan syariat Islam secara ketat. Varian santri ini difokuskan pada waktu dalam melaksanakan kewajibannya yaitu sembahyang sebanyak lima kali yang dilaksanakan sehari-harinya. Selain itu santri juga melaksanakan sembahyang jum'at yang dilakukan secara rutin pada hari jumat sekali dalam satu minggu. Santri juga melaksanakan

---

<sup>19</sup> Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa," *Dialektika* 9, no. 2 (2015): 34–46.

puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh setelah itu melaksanakan zakat. Jika dilihat dari ruang lingkup Jawa, varian santri ini merupakan penganut yang menjalankan syariat Islam secara formal sesuai dengan konsep Islam ortodoks. Terutama menjalankan shalat, puasa zakat dan haji (bila mampu).<sup>20</sup>

Lain halnya dengan varian abangan dan juga varian santri, secara struktural dikalangan jawa varian priyayi ini tergolong sebagai bangsawan yang keyakinannya berpengaruh dengan Hinduisme. Pada umumnya golongan priyayi ini hidup dalam ruang lingkup tradisi kejawen yang sangat kuat. Dalam menjalankan syariat Islam, varian priyayi ini menggabungkan antara ajaran agama, tradisi jawa bahkan menggabungkan tradisi Hinduisme dan Budhaisme.<sup>21</sup>

## 2) Mark Woodward

Pemikiran Mark Woodward dilatar belakangi oleh munculnya pertanyaan mengapa Islam di Jawa berjalan dengan sempurna? Sebab di Jawa telah memeluk agama Islam dan menjadi kepercayaan dikerajaan keraton Mataram. Mark Woodward merangkan 4 ciri paham jawa yang sesuai dengan Islam ; konsep tentang keesaan Tuhan, makna lahir dan batin, hubungan manusia dengan tuhan, relasi markokosmos dengan mikrokosmos. Mark Woodward menganggap bahwa memang dasarnya kepercayaan di Jawa adalah Islam. Sebab secara keseluruhan berlandaskan pada empat konsep tersebut yang ujungnya pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Mark Woodward menanggapi pemikiran Clifford Geertz yang membagi 3 jenis aliran yaitu abangan, santri dan

<sup>20</sup> Mahli Zainudin Tago, 'Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz', 7 (2013), 79–94.

<sup>21</sup> Ahmad Sugeng Riady, 'Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz', 2.1 (2021), 13–22.

<sup>22</sup> Husnul Khatimah and Imam Fawaid, "WAJAH ISLAM INDONESIA Sebuah Tipologi Islam Di Jawa Abad 20," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2018): 373–86, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lisan/article/view/3238>.



priyayi. Mark Woodward meringkas ketiga jenis aliran tersebut dengan dua bagian yaitu, “Islam Mistis” yang diyakini oleh abangan dan priyayi dan “Islam Normatif” yang diyakini oleh santri. Dari keempat konsep tersebut Mark Woodward menjelaskan sebagai berikut;

*Pertama*, konsep terkait dengan ketuhanan yang dalam agama Islam disebut dengan ketahuidan. Menurut Mark Woodward hampir seluruh kepercayaan yang ada di Jawa menyatu dengan Tuhan. Sebab tidak ada agama yang tidak menerima adanya konsep ketuhanan. *Kedua*, konsep lahir dan batin. Mark Woodward menganggap bahwa antara tradisi Islam dan tradisi Jawa tentu berhubungan dengan konsep lahir batin. Dibuktikan dalam al-qur’an berisi tentang peraturan tingkahlaku umat muslim, sedangkan makna batin dari al-qur’an itu sendiri adalah wadah dan isi. Wadah ini berarti menyebutkan sesuatu yang terlihat seperti keindahan alam, bentuk postur tubuh manusia dan ketaatan manusia kepada Tuhan. Lain halnya dengan isi yang artinya persoalan tentang Tuhan dan iman. *Ketiga*, konsep relasi manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi Islam menyatakan terdapat hubungan manusia dengan Tuhan, dibuktikan pada *ittibad*, *bulul* dan *wahdat al-wujud*. Sedangkan dalam tradisi Jawa dibuktikan dengan adanya *jumbubing kawula gusti* atau *manunggaling kawula gusti*. *Keempat*, konsep mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam tradisi Islam dapat dibuktikan anatara manusia dengan Tuhan. Manusia diposisikan sebagai mikrosmos dan Tuhan sebagai makrokosmos. Sedangkan dalam tradisi Jawa disamakan dengan ka’bah dan hati manusia. Ka’bah posisinya sebagai makrokosmos dan hati manusia posisinya sebagai mikrokosmos. Adanya empat konsep tersebut maka Mark Woodward

menyimpulkan bahwa kebatinan yang ada di Jawa ternyata semua sejalan dengan Islam.<sup>23</sup>

Mark woodward juga membagi beberapa kelompok berdasarkan doktrin dan akar sosial masyarakat Islam diantaranya, indigenized Islam (ekspresi Islam yang sifatnya lokal), kelompok tradisional Nahdlatul Ulama, Islam modernis, Islamisme (Islamisme).<sup>24</sup>

4. Indigenized Islam (islam yang sifatnya lokal)

Indigenized Islam merupakan sebuah ekspresi yang sifatnya lokal, yaitu dibuktikan dengan meyakini bahwa mereka beragama Islam namun lebih condong mengikuti peraturan ritual yang berada di masyarakat lokal dari pada melaksanakan syariat Islam. Kriteria seperti ini ternyata sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Clifford Geertz yaitu Islam abangan pada konteks Jawa. Adanya relasi antara politik dengan agama indogenized Islam berfikir secara sekuler dan tidak membawa permasalahan agama pada dunia politik atau Negara ataupun sebaliknya.

5. Kelompok Tradisionil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan paham yang menganut aliran sunni terbanyak di Indonesia dan diyakini memiliki khas khusus, khas yang dimiliki oleh NU tentunya tidak dimiliki oleh kelompok lain, dibuktikan dengan kuatnya pesantren yang berada di pedesaan, relasi antara guru dan siswa yang khas, selain itu dibuktikan karena adanya akomodasi yang kuat atas ekspresi Islam lokal dan tidak memaksakan untuk mengamalkan Arabisme pada kehidupan islam sehari-harinya.

---

<sup>23</sup> Shoni Rahmatullah Amrozi, “Keberagaman Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward,” *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 61–76, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.46>.

<sup>24</sup> Ozi Setiadi, *ISLAM DAN CIVIL SOCIETY:Pergerakan Hizmet di Indonesia sebagai Tipologi Civil Society Budaya*, Imprensa Publishing, 2013.48-49.

#### 6. Islam Modernis

Islam modernis ini dibuktikan dengan adanya Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri merupakan sebuah organisasi terbesar kesdua setelah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Muhammadiyah berbasis pada pelayanan sosial seperti pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Selain itu juga berupaya memunculkan ide atau gagasan terkait dengan modernisasi dalam pemahaman klasik. Muhammadiyah ini berusaha menolak ekspresi Islam lokal dan lebih mengutamakan ekspresi puritarisme yang sifatnya condong ke Araban.

#### 7. Islamisme (Islamis)

Mengamalkan Arabisme dan Konservatisme namun ternyata ada paradigma ideologi Islam Arab. Jadi pada gerakan ini jihad dan pengamalan syariat Islam menjadi kriteria utama. Gerakan ini juga membentuk sebuah kelompok Islam paramiliter dengan tujuan untuk melakukan perlawanan kepada seseorang yang dianggap sebagai musuh dalam Islam yang dianut oleh mereka.

#### 8. Neo-Modernisme Islam

Ciri khas Neo-modernisme Islam ini adalah gerakan intelektual dan kritik pada doktrin Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu dari kelompok tradisional dan kelompok modernis. Gerakan ini biasanya tergabung pada berbagai macam NGO, institusi riset, dan perguruan tinggi Islam. Dengan melakukan riset pada pencarian tafsir baru dalam berbagai macam doktrin Islam sesuai dengan kenyataan masyarakat.<sup>25</sup>

### B. Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan

---

<sup>25</sup> Jungjungan Simorangkir, 'Islam Pasca Orde Baru', *Istinbath*, 15.2 (2016), 205–206.

langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Izza Zulhanda Fitri pada tahun 2017 dengan judul “Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus di Dapil III Kabupaten Jombang)”. Penelitian yang dilakukan oleh Izza Zulhanda Fitri memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menjadikan menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik. Namun juga ada beberapa perbedaan yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Izza Zulhanda Fitri berada di Dapil III DPRD kabupaten Jombang sedangkan peneliti melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Jepara. Selain itu peneliti memfokuskan masalah pada perolehan simpati umat muslim dalam kegiatan reses DPRD difokuskan pada fraksi PKB tahun 2021.<sup>26</sup>

*Kedua*, penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayatullah tahun 2015 dengan judul “Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015”. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitiannya memiliki tujuan yang sama yaitu menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Namun ada beberapa perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah lokasi dan waktu penelitiannya di DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di DPRD fraksi PKB Kabupaten Jepara Tahun 2020. Selain itu tujuan yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang digunakan oleh fraksi PKB Dan fraksi PKB dalam memperoleh simpati umat muslim melalui kegiatan reses tahun 2021.<sup>27</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yadi Supriadi pada tahun 2017 dengan judul “Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung”. Penelitian yang

---

<sup>26</sup> 2017 Izza Zulhanda Fitri, “Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dalam Kegiatan Reses ( Studi Kasus Di Dapil III Kabupaten Jombang),” *Journal Article* 6 (2017): 5–9.

<sup>27</sup> Hidayatullah Hidayatullah and Ulung Pribadi, “Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015,” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 339–67, <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>.

dilakukan oleh Yadi Supriadi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama sama menjelaskan strategi komunikasi politik DPRD. Namun ada beberapa perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yadi Supriadi ini memfokuskan upaya peningkatan peran legislative. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan upaya fraksi PKB dalam memperoleh simpati umat muslim melalui kegiatan reses, selain itu penelitian yang dilakukan peneliti ini ditujukan pada kegiatan reses tahun 2021 namun penelitian yang dilakukan oleh Yadi Supriadi tidak menjelaskan kegiatan khusus namun hanya menjelaskan komunikasi politik, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Yadi Supriadi berada di DPRD Kabupaten Bandung sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di DPRD Kabupaten Jepara khususnya Fraksi PKB.<sup>28</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Shelly Agustia Maulina, Leo Agustino dan Shanty Kartika Dewi pada tahun 2018 dengan judul “Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota DPRD Provinsi Banten (Studi Kasus Pada Masa Persidangan Ke II Tahun Sidang 2017/2018)”. Penelitian yang dilakukan oleh Shelly Agustia Maulina, Leo Agustino dan Shanty Kartika Dewi memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu menjadikan kegiatan reses sebagai penjaringan aspirasi masyarakat. namun ada beberapa perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shelly Agustia Maulina, Leo Agustino dan Shanty Kartika Dewi berlokasi di DPRD provinsi Banten sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di DPRD kabupaten Jepara khususnya di Fraksi PKB, penelitian yang dilakukan oleh Shelly Agustia Maulina, Leo Agustino dan Shanty Kartika Dewi menjelaskan secara khusus pada sidang ke II pada periode 2017/2018 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak menjelaskan kegiatan sidang namun menjelaskan secaralangsung strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh fraksi PKB dalam memperoleh simpati umat muslim. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Shelly Agustia Maulina, Leo Agustino dan Shanty Kartika Dewi menjelaskan beberapa periode

---

<sup>28</sup>Yadi Supriadi, “Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislasi Di Kota Bandung,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 25–36, <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119>.



namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya pada tahun 2021.<sup>29</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Michael G.H. Goni, Herman Nayoan dan Daud Liando pada tahun 2019 dengan judul “Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014- 2019”. Penelitian yang dilakukn oleh Michael G.H. Goni, Herman Nayoan dan Daud Liando dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan menjelaskan tentang penyerapan aspirasi masyarakat. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Michael G.H. Goni, Herman Nayoan dan Daud Liando hanya memfokuskan penyerapan aspirasi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan strategi komunikasi politik dan upaya perolehan simpati umat muslim. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Michael G.H. Goni, Herman Nayoan dan Daud Liando menjelaskan beberapa periode namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya tahun 2021.<sup>30</sup>

### C. Kerangka Berfikir

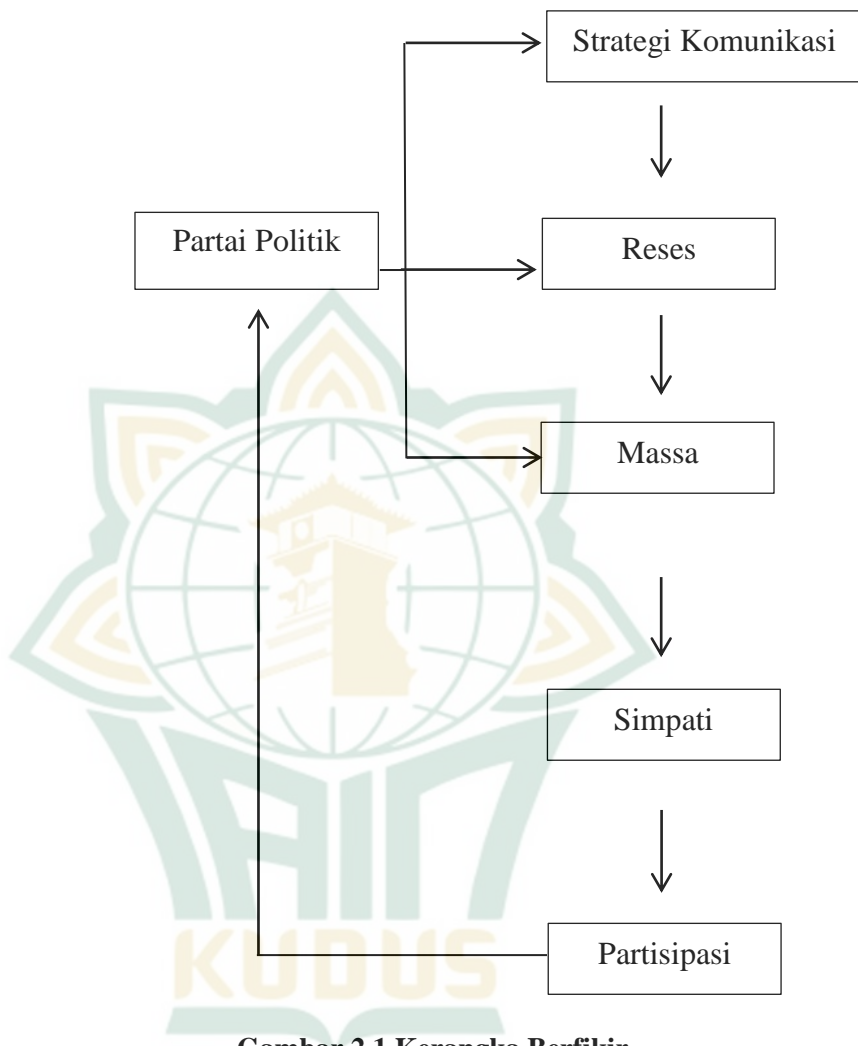
Kerangka pikir merupakan sebuah kajian terkait dengan relasi teori dengan beberapa konsep yang ada pada rumusan masalah. Jadi, sebelum terjun ke lapangan untuk mendapatkan data maka diharapkan mampu menjawab secara teoritis permasalahan penelitian. Upaya untuk menjawab masalah ini disebut kerangka berfikir.<sup>31</sup> Berikut ini adalah kerangka berfikir peneliti ;

---

<sup>29</sup>S.A Maulina, L Agustino, and S.K Dewi, “Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota DPRD Provinsi Banten (Studi Kasus Pada Masa Persidangan Ke II Tahun Sidang 2017/2018),” *Ejournal Untirta* 2(2) (2018).

<sup>30</sup>Herman Nayoan, “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019,” *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1–8.

<sup>31</sup>Rachmat Kriyantono, ‘Teknis Praktis Riset Komunikasi’, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2012), 81.



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

**Keterangan :**

Partai politik terbentuk atas sekelompok masyarakat dengan rasa sukarela serta adanya kesamaan tujuan yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan Negara. Dalam partai politik tentu terdapat strategi komunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir atau tingkah laku masyarakat. Salah satu strategi komunikasi yang digunakan oleh partai politik yaitu melalui kegiatan reses. Reses ini merupakan

tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Sasaran dari kegiatan reses ini adalah masyarakat itu sendiri atau bisa dikatakan dengan massa. Dari proses kegiatan tersebut maka munculah simpati dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dengan harapan aspirasi mereka dijadikan sebagai kebijakan umum. Adanya simpati tersebut maka munculah partisipasi. Partisipasi ini akan mendorong proses terbentuknya partai politik.

